

SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM (ANALISA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN)



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi

Srta I Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS FAI

Diajukan Oleh:

RISKA MARDIANA
I000160127

**PROGAM STUDI HUKUM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Analisa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

RISKA MARDIANA
1000160127

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Drs. Harun, M.H.)
NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

**SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (ANALISA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN)**

OLEH:

RISKA MARDIANA

I000160127

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 22 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Harun, M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Yayuli, S.Ag.M.PI.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Azhar Alam, S.E., Lc. M.SEI
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan dalam sepengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Penulis



Riska Mardiana

I000160127

Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

(Analisa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Abstrak

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan, tidak ada satu wajib pajak yang dapat menghindari kewajiban tersebut kecuali ia meninggal dunia atau alasan spesifik tertentu, pemungutan pajak tersebut diwajibkan karena pajak merupakan sumber utama bagi penghasilan negara. Sistem perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Islam, sehingga timbul pertanyaan apakah sistem pajak di Indonesia telah sesuai dengan pajak (*daribah*) menurut Islam. Pemungutan pajak menurut Islam harus menganut syarat dan prinsip ekonomi Islam dalam setiap pelaksanaannya yang juga berpedoman pada Al-Quran dan Hadits.

Kata Kunci: sistem perpajakan, pajak menurut syariah

Abstract

Tax is an obligation for every Indonesian citizen who already has income, there is no taxpayer who can avoid these obligations unless he dies or for certain specific reasons, tax collection is required because taxes are the main source of state income. The taxation system in Indonesia is regulated in Law No. 28/2007 concerning General Provisions and Tax Procedures. Indonesia is a country with a Muslim majority, so the question arises whether the tax system in Indonesia is in accordance with the tax (*daribah*) according to Islam. Tax collection according to Islam must adhere to the terms and principles of Islamic economics in every implementation which is also guided by the Koran and Hadith.

Keywords: taxation system, tax according to sharia

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap kebijakannya didasari Undang-Undang, begitu pula dalam kebijakan perpajakan yang berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah bersifat memaksa seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang berisi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan dari undang undang tersebut ciri-ciri pengertian pajak dapat diberikan sebagai berikut (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan, (2) dalam pembayaran pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung bisa di tunjuk, (3) pajak di pungut oleh negara, baik pusat maupun daerah, (4) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.¹

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara oleh sebab itu kewajiban membayar pajak bagi seluruh penduduknya meskipun tidak ada timbal balik secara langsung yang dirasakan wajib pajak, pajak juga tidak ada kepastian kapan akan berakhirnya pungutan tersebut diberlakukan, karena apabila pungutan pajak diberhentikan maka negara tidak memiliki penghasilan dan akan berdampak besar. Salah satunya pembangunan infrastruktur berhenti sebab terhalang dana, uang yang diperedaran semakin tidak terkontrol sehingga terjadi inflasi dan masih banyak dampak-dampak besar lainnya.

Indonesia merupakan negara demokratis dimana masyarakatnya tidak dipaksakan untuk memeluk suatu agama tertentu, mereka berhak menentukan agama masing-masing yang sesuai dengan keyakinannya, kewajiban membayar pajak juga tidak melihat seseorang berdasarkan ras, suku, maupun agama, kewajiban pemungutan pajak dibebankan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan memiliki usaha di Indonesia.

Oleh sebab itu muncul pertanyaan dan keraguan oleh masyarakat muslim yang mempertanyakan apakah sistem pemungutan di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip Syariah, sehingga muncul banyak perdebatan para ulama yang mengatakan bahwa pemungutan pajak bagi orang muslim hukunya haram dan sebagian ulama lain yang mengatakan boleh asal tujuan dan manfaatnya jelas.

¹ Setu. setyawan, Perpajakan, (malang-jawa timur: Bayumedia Publishing, 2004) hlm. 1.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul skripsi “SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisa Undang-Undang No.. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pustaka, dimana penulis memperoleh sumber melalui buku, jurnal, serta internet yang obyeknya sesuai dengan yang akan di kaji. Sifat penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif dimana penulis dapat meperoleh data melalui dokumentasi, wawancara, serta observasi. Penulis menggunakan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam dan pendekatan normatif, maksud pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam ialah pendapat Nabi Muhammad, para sahabatnya dan para ulama tentang pajak (*dharibah*) menurut Islam. Topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana terapan sistem perpajakan di Indonesia yang di atur dalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana yang telah diketahui bahwa negara indonesia 80% penduduknya merupakan agama islam sehingga apakah sistem tersebut sesuai dengan hukum Islam. Penulis mengambil data melalui dua sumber, yang pertama sumber primer yaitu sumber yang diperoleh dari UU RI No 28 Tahunn 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan sumber data sekundernya adalah data dari buku dan jurnal yang membahas tentang sistem perpajakan dan pajak (*dharibah*) menurut hukum Islam. Dalam metode analisis data penulis menggunakan metode kualitaif, dimana metode ini menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, masalah yang dihadapi penulis merupakan keraguan dari masyarakat Islam atas kewajiban pembayaran pajak. Langkah terakhir adalah pengumpulan data serta sinkronisasi terhadap kedua data yang berbeda secara sistematis dengan

menguraian kata-kata yang dapat dipahami oleh umum agar dapat ditarik kesimpulannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Perpajakan di Indonesia (UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Dalam sejarahnya pajak memang sudah ada sejak jaman dulu kala, meskipun pada saat itu belum dinamakan “pajak”. namun sifatnya sama dengan pajak yaitu pemberian sukarela dari masyarakat kepada rajanya. Sejalan dengan perkembangan jaman pemberian sukarela tersebut berubah sebutan menjadi upeti yang sifatnya pemberian tersebut diwajibkan kepada masyarakatnya oleh pihak negara. Hal itu dikarenakan kebutuhan negara yang semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk memepertahankan negara dan melindungi rakyatnya untuk memepertahankan diri dari serangan musuh maupun untuk pembangunan.² Pengertian pajak dalam Undang-Undang terdapat pada UU KUTAP No. 28 Tahun 2007 pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) yang berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”³

Dalam karya yang ditulis oleh H.S munawir, beliau memaparkan pengertian pajak dalam beberapa poin, yaitu diantaranya:⁴ (1) Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaanya.

² H.S Munawir, Perpajakan (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), hlm.3.

³ Primandita Fitriandi. Yuda Aryanto. Agus Puji Priyono, Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 2.

⁴ H.S Munawir, Perpajakan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), hlm. 3.

Dengan kata lain, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak proregatif pemerintah. (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontra-prestasi individual dari pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra-prestasi secara individual) (3) Pajak peruntukan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat “surplus” dipergunaan untuk membiayai “*publik invesment*”, sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (*butgetair*). (4) Pajak dipungut disebabkan karna suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dengan demikian, pajak hanya dapat di pungut oleh pemerintah dan pemerintah baru memiliki hak untuk memungut apabila memungut pajak sudah tertulis secara sah dalam Undang-Undang sebagai pengatur pelaksanaanya. Intinya pajak merupakan kewajiban bagi setia Warga Negara Indonesia, apabila diabaikan akan mendapat sanksi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (1) juga di jelaskan fungsi pajak, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara (*Budgetair*) yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang dana nya di salurkan untuk kepentingan negara dan pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas umum. Fungsi yang kedua yaitu mengatur (*regulerend*) dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang berfungsi pengaturan pajak dapat digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.⁵ Pemungutan pajak juga berfungsi sebagai pemerataan (pajak distribusi), yang digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi,

⁵ Ibid hlm 6.

pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi (fungsi stabilitas).⁶

Setelah menganalisa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun, penulis menyimpulkan bahwa yang telah diterapkan di Indonesia terkait stlsel, asas, dan sistemnya menghasilkan data sebagai berikut: (1) Dilihat dari stelselnya maka di Indonesia menerapkan stelsel nyata, namun untuk penerapannya sendiri menggunakan stelsel campuran. Dimana pada awal tahun menggunakan stelsel anggapan dan pada akhir tahun menerapkan stelsel nyata. (2) Ditinjau dari asasnya maka wajib pajak WNI menggunakan asas domisili, sedagkan untuk wajib pajak WNA digunakan asas sumber, dan untuk badan maupun orang diterapkan asas kebangsaan. (3) Dilihat dari sistemnya maka penerapan di Inonesia adalah sebagai berikut:⁷ (a) Pada tahun 1967, untuk pajak peseroan dan pajak pendapatan mnnggunakan sistem *official assessment system*. Yang kegunaanya pada awal tahun untuk kepentingan pembayaran angsuran pajak maka diterbitkan SKPS (Surat Ketetapan Pajak Sementara), sedangkan untuk akhit tahun pajak untuk menentukan besarnya pajak yang sesungguhnya terhutang maka diterbitkan SKPR (Surat Ketetapan Pajak Rampung). (b) Mulai tahun 1968 sampai tahun 1983 diterapkan *semi self assessment system* dan *withholding system*, yang pada masa itu wajib pajak dan pihak ketiga menghitung sendiri pajak terhutang berdasarkan suatu anggapan, sedangkan besarnya pajak yang sesungguhnya ditetapkan oleh aparatur pajak. (c) Mulai tahun 1984 hingga tahun 1997 masih diterapkan *full self assessment system*, dimana pada sistem ini masyarakat wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya angsuran pajak dan besarnya pajak yang

⁶ Cermati.com, “pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya” (Online), (<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>) diakses 05 maret 2020.

⁷ H.S Munawir, Perpajakan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000) hlm. 46.

sesungguhnya terhutang. Pihak aparatatur pajak hanya akan memberikan bimbingan, mengawasi serta meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan wajib pajak.

TABEL MACAM-MACAM PAJAK DALAM REGULASI

Pajak Negara	Pajak Daerah
<p>a. Pajak Penghasilan (PPh)</p> <p>Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Adalah UU No. 7 Tahun 1984 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.</p> <p>b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM).</p> <p>Dasar hukum pengenaan pajak PPN dan PPn BM adalah UU No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah dengan UU N0. 42 Tahun 2009. Undang-Undang PPN dan PPn BM mulai diberlakukan sejak tanggal 1 april tahun 1985 dan merupakan</p>	<p>a. Jenis Pajak dan Objek Pajak</p> <p>Terdapat 2 bagian pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota:⁸</p> <p>Yang <i>pertama</i> adalah Pajak Provinsi, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok <p>Yang <i>kedua</i> merupakan Pajak Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan

⁸ Ibid hlm 13.

<p>pengganti dari UU Pajak Penjualan 1951.</p> <p>c. Bea Materai</p> <p>Dasar hukum yang digunakan dalam pengenaan pajak Bea Materai adalah UU No. 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Materai yang lama (aturan Bea Materai 1921)</p> <p>d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p> <p>Pengenaan PBB memiliki dasar hukum yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 1985 dan telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994. Undang-Undang PBB mulai berlakuu pada tanggal 1 Januari 1986</p> <p>e. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</p> <p>Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000. Undang-Undangg BPHTB mulai</p>	<p>6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>7. Pajak Parkir</p> <p>8. Pajak Air Tanah</p> <p>9. Pajak Sarang Burung Walet</p> <p>10. Pajak Bumi dan Bngunan Perdesaan dan Perkotaan</p> <p>11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bngunan.</p> <p>Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.⁹</p>
--	---

⁹ Ibid hlm 13.

berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.	
--	--

3.2 Pajak (dharibah) menurut Islam

Pengertian pajak secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *لَصْرِيَّةٌ* (*Adh-Dharibah*), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut *الْخَرَجُ* (*Al-Kharaj*), akan tetapi *Al-Kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.¹⁰ Sedangkan pajak secara istilah ada tiga pendapat ulama yang memberikan definisi pajak dalam islam dikutip melalui buku Pajak Menurut Syariah yang ditulis oleh Gusfahmi:2007,¹¹ yaitu:

Yusuf Qardhawi berpendapat:

“ Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara”

Gazi Inayah berpendapat:

“ Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”

¹⁰ Abu Ibrahim Muhammad Ali, Pajak Dalam Islam, (online), (<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>), diakses 10 desember 2019)

¹¹ Miming. Lestari, Konsep Perpajakan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus di Kota Makassar), laporan tidak diterbitkan, (Makassar: UIN Alaidin Makassar, 2015), Hlm 10.

Abdul Qadim Zallum berpendapat:

“ Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta”.

Dikutip dari Kholis, 2010 dalam (Astrini:2012, 30) mengungkapkan karakteristik pajak dalam islam bahwa pajak hanya diberlakukan pada orang mampu atau kaya dan tidak dibebankan kepada masyarakat miskin. Pajak (*dharibah*) juga bersifat temporer yakni boleh dipungut apabila baitul mall atau kas negara sudah kekurangan harta atau sudah habis, pajak (*dharibah*) juga hanya dapat dibebankan kepada masyarakat muslim dan tidak boleh melebihi dari jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Setelah baitul mall terisi kembali maka pajak dapat dihapuskan atau tidak diberlakukan lagi. Namun berbeda dengan pemungutan zakat, zakat akan terus dipungut meskipun sudah tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*).¹²

Dalam hukum Islam dalam melakukan pemungutan pajak perlu menggunakan prinsip serta syarat yang sesuai asas perekonomian Islam. Terdapat 5 asas perekonomian dalam Islam yang *pertama* adalah Tauhid (keimanan), tauhid merupakan pondasi dalam ajaran Islam bahwasanya kita harus menyakini bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan mengatur segala sesuatunya.

Nilai Tauhid dalam kebijakan pemungutan pajak (*dharibah*) adalah pembebanan pajak hanya dilakukan saat pemerintah kekurangan dana untuk kemaslahatan umum, maka perlu dilakukan penarikan pajak dalam keadaan tertentu untuk menjauhkan kemudharatan. Maka dalam hal ini negara boleh melakukan penarikan pajak untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.

¹² Ibid hlm 19.

Setiap pendapatan negara dalam Islam harus sesuai dengan hukum ‘Syara’. Dengan demikian prinsip sebelum melakukan pemungutan pajak terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Sehingga dalam Islam tidak diperkenankan mengambil sedikitpun harta Muslim kecuali dengan dengan cara menurut syara’ seperti yang terdapat dalam dalil-dalil syara’ yang terperinci. Nabi Saw bersabda:

“Tidak halal harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR Bukhari dan Muslim)¹³

Yang *kedua* adalah menggunakan prinsip Musyawarah, dalam menjalankan sistem perekonomian pemerintah haruslah memegang nilai musyawarah, dimana pemerintah tidak boleh semena-mena dalam menjalankan kebijakannya seperti halnya dalam pemungutan pajak, kegiatan tersebut haruslah dilakukan musyawarah agar saling mengerti kondisi kedua pihak antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak terjadi kemudhorotan. Musyawarah juga menunjukkan adanya transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Ketiga Keadilan. Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah harus mengedepankan prinsip keadilan, dengan keadilan akan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Prinsip keadilan juga sangat penting dalam pemungutan pajak dan zakat, dalam pemungutan keduanya haruslah orang mampu saja yang dapat dianggap memiliki kewajiban, baik bagi orang

¹³ Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, GHASHB (MERAMPAS HARTA ORANG LAIN), (Online), (<https://almanhaj.or.id/1030-ghashb-merampas-harta-orang-lain.html> diakses 10 April 2020)

muslim maupun nonmuslim. Berikut firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 219:¹⁴

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Keempat adalah Kebebasan, Allah memberikan kebebasan dalam kegiatan apapun termasuk aktivitas dalam perekonomian dengan jaminan apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan dan ajaran yang telah Allah tetapkan. Dan juga harus bersifat jujur.

Dan terakhir *kelima*, Amanah. Pemerintah yang menjadi khalifah atas sistem pemungutan harus bertanggung jawab terhadap dana yang sudah dikeluarkan dari rakyatnya. Pemerintah harus mengelola dan mendistribusikan kepada yang semestinya.

Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh negara dalam Islam disebut *Dharibah*, selain *dharibah* terdapat pungutan-pungutan lain yang ditarik oleh negara Islam yang subjeknya merupakan penduduk *dzimi* yang bertempat tinggal diwilayah Islam, berikut macam-macam pajak dalam Islam dan objeknya: (1) *Kharaj* merupakan pajak atas tanah yang dipungut dari penduduk nonmuslim yang berhasil di taklukan oleh tentara Islam, tanah tersebut disewakan kepada mereka untuk melakukan kegiatan pertanian dengan imbalan membayar sewa. (2) *Jizyah* merupakan pajak yang dibebankan terhadap nonmuslim, *Jizyah* ditarik oleh pemerintah Islam untuk perlindungan bagi kaum *dzimi* atas harta benda, kehormatannya serta

¹⁴ Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 (Online) (<https://tafsirweb.com/851-quran-surat-al-baqarah-ayat-219.html>) diakses pada 10 April 2020.

kebebasan untuk beribadah dari tentara Islam. (3) *Ushr* menurut bahasa berarti persepuluh, sedangkan menurut istilah adalah pajak yang dipungut dari pedagang asing yang melewati batas negara Islam dengan membayar *Ushr* berupa uang maupun barang.

Berkaitan dengan data yang telah penulis peroleh diatas, data dari Undang-Undang tentang KUTAP maupun data konsep pajak menurut syariah, penulis mendapatkan hasil dan memberikan pendapat bahwa undang-undang yang diberlakukan di Indonesia sebagai negara Islam dengan konsep pajak menurut syariah tidak sesuai. Diketahui bahwa kewajiban membayar pajak di Indonesia adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki penghasilan tanpa adanya pengecualian agama, suku dan ras, hal ini jelas diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan dalam konsep pajak (*dharibah*) dalam Islam pungutan hanya diberlakukan terhadap orang muslim yang kaya dan penggunaan kas tersebut juga diperuntukan bagi masyarakat muslim saja dan sewaktu-waktu pajak (*dharibah*) dapat dihapuskan atau diberhentikan dengan alasan baitul mal telah terisi kembali, bagi kaum *dzimi* tidak akan diberi kewajiban dan mendapat hak. Namun berselangnya waktu kaum *dzimi* mulai dibebankan pajak, pajak yang subjeknya kaum *dzimi* dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut: *Kharaj*, *Jizyah* dan *Ushr*. Ketiga pungutan tersebut menekankan bahwa pajak hanya bagi para *dzimi* yang bertempat tinggal diwilayah negara Islam. Dengan tujuannya jelas untuk memberikan jaminan kepada mereka atas imbalan pembayaran pajak tersebut, pungutan juga tidak akan di bebaskan dan dapat dihapuskan apabila Baitul Mal (harta/kas negara) telah terisi kembali dan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan negara yang

digunakan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan kewajiban masyarakat muslim adalah membayar zakat setiap tahunnya untuk hak para kafir dan miskin dengan tujuan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Ketentuan pajak di Indonesia dan pajak menurut Islam sangat tidak relevan mengingat bahwa subyek pajak diantara keduanya sangat berbeda. Dalam islam juga dijelaskan di dalam fiqh yang berbunyi:

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”

Sedangkan dalam negara Indonesia tidak memberikan jaminan secara langsung bagi WNI yang beragama Islam dengan status sosial menengah kebawah, sering kali masyarakat miskin tersebut masih sering mendapat kedzoliman dari pihak-pihak yang berkuasa. Hak-hak mereka untuk mendapat perlindungan harta, jiwa, dan kehormatannya sering kali diabaikan oleh pemerintah.

Menurut penulis, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam seharusnya dibebaskan dari pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, hal tersebut diperkuat oleh pendapat ulama yang mengatakan bahwa pajak haram hukumnya dipungut dari orang-orang Islam yaitu dikutip dari Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dikutip dari judul skripsi “Konsep Perpajakan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam’ yang ditulis oleh Miming Lestari.¹⁵

Dari abu Khair Ra beliau berkata, Maslamah bin Makhlad (gubernur Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Ra, maka Ia berkata:

”Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) di neraka”.¹⁶

Imam Abu Ja’far Ath Thawawi Rahimahumullah berkata bahwa:

”Al-Usyr yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah Saw.. atas kaum muslimin adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum

¹⁵ Miming. Lestari, Konsep Pajak Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dikota Makassar), laporan tidak diterbitkan, (Makassar: Universitas Islam Negri Alaudin Makassar, 2015).

¹⁶ Abu Ibrahim Muhammad ‘Ali -hafidzahullah-, Pajak Dalam Islam, (online), (<https://maktabahabiyahya.wordpress.com/2012/02/29/pajak-dalam-islam/>) diakses 10 april 2020)

jahilliyah. Kemudian beliau melanjutkan, ”hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat”¹⁷

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah dalam QS. Annisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁸

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, diantaranya bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“sesungguhnya para penarik/ pemungut pajak (diazab) dineraka”

(HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab al-Imarah : 7)¹⁹

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa ibrah/hikmah yang agung diantaranya ialah:²⁰

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Q.S An-Nissa ayat 29, (Online) (<https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html>) diakses pada 10 April 2020.

¹⁹ Abu Ibrahim Muhammad ‘Ali -hafidzahullah-, Pajak Dalam Islam, (online), (<https://maktabahabiyahya.wordpress.com/2012/02/29/pajak-dalam-islam/>) diakses 10 april 2020)

²⁰ Purnomo, Ternyata Pajak adalah Kemaksiatan dan Dosa yang Membinasakan Pelakunya, (Online), (<https://www.voa-islam.com/read/ibadah/2010/04/06/4793/ternyata-pajak-adalah-kemaksiatan-dan-dosa-yang-membinasakan-pelakunya/>) diakses 10 april 2020)

“Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti”

Terlepas dari pendapat fuqaha mengenai keharaman pemungutan pajak. Ketentuan pajak berfungsi menstabilkan ekonomi masyarakat dan menekan inflasi, sehingga diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi agar kesenjangan sosial tidak terlalu tinggi. Untuk itu dalam pemungutan yang sangat perlu diperhatikan adalah target pembebanan pemungutan pajak, tarif pajak, dan seberapa luas cakupan dana pajak itu direalisasikan. Pemerintah harus lebih teliti dalam menjalankan kebijakan pemungutan pajak tersebut karna melibatkan kepentingan orang banyak dan sangat sensitif. Diharapkan pemerintah dapat sebijak mungkin dalam memungut dan meralisasikan kas negara tersebut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang *pertama* Sistem Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa subjek pemungutan pajak adalah seluruh penduduk Indonesia yang bertempat tinggal mapun memiliki usaha di indonesia, karena negara Indonesia adalah negara Demokratis yang membebaskan penduduknya untuk memeluk agama dan melakukan ibadah menurut kepercayaan masing-masing maka tidak ada pengecualian pembebasan atas kewajiban pajak dengan alasan menganut suatu agama tertentu. Kewajiaban membayar pajak bagi seluruh penduduk Indonesia juga tidak dapat ditentukan kapan berakhirnya pungutan pajak tersebut diberlakukan karena pajak merupakan pengasilan utama bagi negara. Setiap tahunanya pendataan bagi wajib pajak juga harus

dioptimalkan sehingga tidak ada penanggung pajak baru yang terlewat. Dan *kedua* Berdasarkan hasil dari penelitian pajak di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tidak sesuai dengan pajak (dharibah) menurut Islam. Karena jelas bahwa pajak (dharibah) menurut Islam hanya diberakukan untuk penduduk muslim kaya, pungutan (dharibah) tersebut juga hanya dilakukan apabila kebutuhan negara meningkat dan baitul mal tidak terisi. Sedangkan pungutan seperti Kharaj, Jizyah, dan Ushr hanya dibebankan kepada nonmuslim untuk mendapatkan hak nya atas bertempat tinggal diwilayah negara Islam.

4.2 Saran

Sebagai penutup dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran kepada aparat pajak sebagai bentuk kepedulian penulis tentang pro dan kontra yang terjadi di masyarakat dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru untuk memutus pro dan kontra yang terjadi terkait sistem perpajakan di Indonesia. Yang *pertama* pemerintah harus lebih bijak dalam permasalahan pro dan kontra tentang pemungutan pajak yang di bebaskan kepada masyarakat muslim, diharapkan ada kebijakan dari pemerintah dalam keringanan pembayaran pajak bagi masyarakat muslim yang juga telah diwajibkan membayar pajak. *Kedua* pemerintah diharapkan dapat bersifat amanah dan transparansi dalam penyaluran dana pajak, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan timbul kepercayaan kepada pemerintah. *Ketiga* pajak harus benar-benar didistribusikan untuk kepentingan masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dan *keempat* aparat pajak harus lebih jeli dalam memperoleh data dari wajib pajak, sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan wajib pajak. Misal utang pajak lebih besar dari harta wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran, Al-Baqarah ayat 219 (Online) <https://tafsirweb.com/851-quran-surat-al-baqarah-ayat-219.html> () diakses pada 10 April 2020.

Al-Quran, Annisa ayat 29, (Online) (<https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html>) diakses pada 10 April 2020.

Abdul Azhim, Syaikh bin Badawi al-Khalafi, *GHASHB (MERAMPAS HARTA ORANG LAIN)*, (Online), (<https://almanhaj.or.id/1030-ghashb-merampas-harta-orang-lain.html>) diakses 10 April 2020.

Cermati.com, *pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya*. 2020 (Online), (<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>) diakses 05 maret 2020.

Fitria, Primandita. DKK, 2014, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Jakarta: Sumba Empat.

Ibrahim Muhammad, Abu ‘Ali -hafidzahullah-, *Pajak Dalam Islam*. 2012, (online), (<https://maktabahabiyahya.wordpress.com/2012/02/29/pajak-dalam-islam/>) diakses 10 april 2020.

Lestari, Miming. 2015, *Konsep Pajak dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)*, Makassar: UIN Alaudin Makassar.

Munawir, H.S. 2000, *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Purnomo. *Ternyata Pajak Adalah Kemaksiatan dan Dosa yang Membinasakan Pelakunya*. 2010, (online), (<https://www.voa-islam.com/read/ibadah/2010/04/06/4793/ternyata-pajak-adalah-kemaksiatan-dan-dosa-yang-membinasakan-pelakunya/>) diakses 10 april 2020)

Setyawan, Setu. *Perpajakan*, Malang-Jawa Timur: Bayumedia Publishing.